

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Di Kabupaten Tasikmalaya Periode 1986-2015)**

Ririn Ariandini

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: ririnariandini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh antara variabel: Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Kurs Mata Uang Asing Dollar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis VECM (*Vector Error Correction Model*) menggunakan bantuan program Eviews 7.

Setelah dilakukan analisis data melalui uji awal (*root level* dan *first different*) diketahui bahwa kualitas data baik dan tidak ada masalah. Kemudian dari pengujian estimasi jangka pendek diketahui hanya satu variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu variabel Kurs. Sedangkan dalam estimasi jangka panjang diketahui hanya satu variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci : PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk, Kurs.

Abstrack

This research aims to provide empirical evidence regarding the review whether there is influence between the variables: Economic Growth, Population and Dollar Exchange rate against local revenue of Tasikmalaya regency. The used analysis model is a method of analysis VECM (Vector Error Correction Model) using Eviews 7 Assistance Program.

After analyzing the data through the initial test (root level and the first different), the data quality is worthy and there is no problem to be found. Then from short-term testing estimate known that only one variable which has significant influence against the local revenue namely variable of exchange rate. Meanwhile, in the Long Term estimation only one variable known has a significant influence against local revenue growth namely variable of economic growth.

Keywords: *Economic growth, Population, Exchange rate*

LATAR BELAKANG

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang pengembangan otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan keuangan daerah membawa perubahan terhadap pembagian tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil yang optimal dari kekayaan yang dimiliki daerahnya.

Setiap pemerintah daerah di Indonesia diberikan hak dan juga wewenang untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli daerah mencerminkan kemandirian daerah, maka ketika pendapatan daerah semakin besar, berarti daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Sehingga pemerintah daerah tidak begitu ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut sebagai wujud dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Arsyad dalam Azzumar, 2011).

PAD merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan daerah. Selain itu PAD itu sendiri merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan salah satu komponen penting penerimaan keuangan daerah selain dari hasil pajak dan bukan pajak. Besarnya pendapatan asli daerah yang didapat suatu daerah menunjukkan derajat indikasi kemandirian suatu daerah. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pasal 4 disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan juga bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan daerah sendiri dengan didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggara-nya otonomi daerah yang semakin baik, maka usaha yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri adalah dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah dituntut agar lebih bisa mandiri dalam mengelola hasil penerimaan yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah, melakukan tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil yang optimal dari kekayaan yang dimiliki daerahnya. Setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2002).

Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya, dimana kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari Kota Tasikmalaya sejak tahun 2011 yang memiliki pendapatan asli daerah dari berbagai sumber. Hal ini sesuai dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 4 disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1985-2015 Dengan Pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM)**”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penguraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kurs Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai teori menjelaskan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang umumnya didasarkan pada seberapa besar penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri, dipungut dengan berdasarkan dari peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Berikut ini adalah pengertian PAD menurut beberapa ahli:

Menurut Halim (2004:96) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah berupa penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang dapat bersumber dari ebrbagai sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di dalam daerah tersebut. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat

penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kemudian menurut SamsubarSaleh(2003) dalam Libaran (2013) menyebutkan bahwa :

”pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah”.

Menurut Halim (2004) dalam Libaran (2013)

“pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri atas : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

A. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Adapun sumber-sumber pendapatan menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

Sumber utama dan pertama dari PAD adalah dari pajak di daerah tersebut,. Hasil pajak daerah merupakan sejumlah uang yang diambil atau dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur dan ditetapkan untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah, retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas bayaran yang diberikan masyarakat setelah memperoleh atau memakai jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota

masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
- 2) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk dikelola dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari penggolongan di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Perimbangan Terdiri Atas :

- 1) Bagian daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan PAD

Pertumbuhan Ekonomi mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk bisa menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik maka pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sehingga semakin tinggi kondisi perekonomian suatu daerah tersebut maka akan menunjang terhadap peningkatan PAD.

Hubungan Jumlah Penduduk dengan PAD

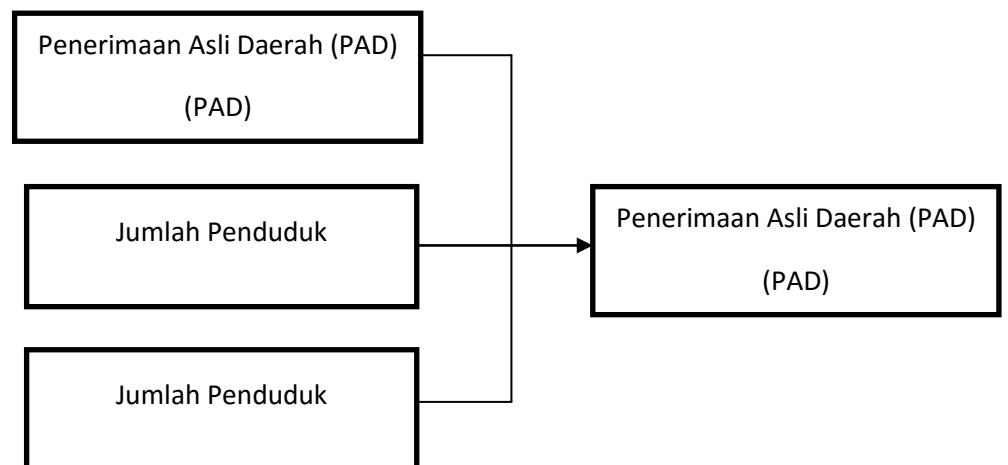
Jaya Widanta (Budiharjo, 2003:159) mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai aset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Hubungan Kurs Terhadap PAD

Kurs valuta asing adalah salah satu alat pengukur lain yang digunakan dalam menilai kekuatan suatu perekonomian. Kurs menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Kurs valuta asing dapat dikatakan sebagai harga dari mata uang asing. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca perdagangan nasional. Neraca perdagangan nasional yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing. Dan sebaliknya, apabila neraca pembayaran kuat (surplus dalam neraca keseluruhan) dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus menerus bertambah jumlahnya, nilai valuta asing akan bertambah murah. Maka perubahan-perubahan kurs valuta asing dapat dipergunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai kestabilan dan perkembangan suatu perekonomian.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan volume ekspor. Bila permintaan pasar internasional cukup elastis, hal ini akan meningkatkan *cash flow* perusahaan domestik, kemudian meningkatkan harga saham. Meningkatnya harga saham ini berarti meningkatkan *Return Saham*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat kurs mata uang domestik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



DEFINISI OPERASIONAL

- a. Pendapatan Asli Daerah (Y) merupakan iuran atau pungutan lain yang berbentuk retribusi dari seorang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha (Jutaan).
- b. Pertumbuhan Ekonomi (X1) menggambarkan perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan selama periode tertentu (Konstan).
- c. Jumlah penduduk (X2) merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah tersebut (Jutaan)
- d. Kurs (X3) merupakan harga mata uang negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs dollar Amerika terhadap rupiah (Ribuan)

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis VECM (*Vector Error Correction Model*) yang merupakan metode penurunan dari VAR. Metode VECM (*Vector Error Correction Model*) pertama kali dipopulerkan oleh Engle dan Granger untuk mengoreksi disequilibrium jangka pendek terhadap jangka panjangnya.

Dari hasil pengujian uji stationeritas, uji kointegrasi, uji panjang lag, uji kausalitas granger, impuls response function (IRF) dan uji *Variance Decomposition* diperoleh keseimbangan baru, sebagai berikut:

$$\Delta Z_t = \tau_1 \Delta Z_{t-1} + \tau_2 \Delta Z_{t-1} + \tau_{t-1} \Delta Z_{t-1} + \rho_t Z_{t-1} + \mu + \rho_t \quad t = 1, \dots, T \dots (3.1)$$

Dimana :

ΔZ_t : PAD

t : Parameter diduga

ρ_t : Vector Impuls

PEMBAHASAN

a) Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tasikmalaya

Nilai Koefisien Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0.004526 dengan nilai probabilitas 0.05 persen. Artinya apabila terjadi kenaikan PAD sebesar satu poin pada tahun sebelumnya, maka PAD pada tahun sekarang akan naik sebesar 0.004 poin. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis dimana nilai t-Statistik parsial variabel PAD sebesar 7.62156. Yang artinya H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima atau dengan kata lain, variabel PE signifikan terhadap PAD.

Hasil estimasi ini sesuai dengan penelitian Ayu Desmawati (2015) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah". Dalam penelitian ini dijelaskan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapat kenaikan PAD. Hal ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

b) Jumlah Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya

Nilai koefisien Jumlah Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya sebesar -0.042625 dengan nilai probabilitas 0.05 persen. Ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c) Kurs Di Kabupaten Tasikmalaya

Nilai koefisien kurs di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 19.20917 dengan nilai probabilitas 0.05 persen. Artinya apabila terjadi kenaikan PAD sebesar satu poin pada tahun sebelumnya, maka PAD pada

tahun sekarang akan naik sebesar 19.2 poin. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis dimana nilai t-Statistik parsial variabel PAD sebesar 2.26312. Yang artinya H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima atau dengan kata lain, variabel KURS signifikan terhadap PAD dalam jangka pendek.

Kurs dapat didefinisikan sebagai jumlah atau harga mata uang domestik dari mata uang luar negeri (Salvatore:1995). Perubahan-perubahan kurs dapat disebut dengan depresiasi atau sebaliknya apresiasi. Depresiasi merupakan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Dalam kondisi ceteris paribus, depresiasi membuat harga barang-barang dan jasa menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri. Sedangkan apresiasi dalam kondisi ceteris paribus menyebabkan harga barang-barang dan jasa menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan regresi data *Vector Error Correction Model* (VECM) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Maka dapat dilihat hasil kesimpulan. variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam estimasi panjang. Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dalam estimasi jangka pendek di Kabupaten Tasikmalaya walaupun belum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun jumlah penduduk yang produktif akan berpengaruh terhadap perekonomian. Variabel kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam estimasi jangka pendek terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Saran

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari adanya berbagai keterbatasan, sehingga berikut ini akan dijabarkan saran yang disusun oleh peneliti:

1. Dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah untuk dapat mendorong kebijakan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pemerintah melakukan perbaikan sektor publik dan juga kenaikan penerimaan pajak yang tentunya akan memberikan sumbangsih untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masyarakat bisa mengetahui realisasi dari penerimaan pajak dan retribusi yang telah dibayarkan.
2. Pemerintah seharusnya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan meningkatkan sektor-sektor yang berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan cara spesialisasi dan memanfaatkan keunggulan komparatif .

3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dengan mengembangkan metode penelitian yang lain, agar Pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang tepat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ari Budiharjo, (2003). *Dasar-dasar Ilmu Pembangunan*, Gramedia Pustaka.
- Arief. Budiman, (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama.
- Azzumar, (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Basuki Agus Tri, Yuliadi Imam (2015). *Ekonometrika Teori & Aplikasi*. Edisi 1 Mitra Pustaka Nurani Yogyakarta.
- Boediono, (2008). *Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 4*. Yogyakarta :BPFE
- Dornbusch, R. S. Fischer, dan R. Startz 2004. *Macroeconomics* 9th ed. McGraw-Hill, Boston.
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grossman dan Helpman, (1994). *Innovation and Growth in the Global*.
- Gujarati, Damodar. (1997). *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Hariadi, Pramono (2006), *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah*.
- Hudiyanto, *Ekonomi Pembangunan (2014)* Lingkar Media Yogyakarta.
- Indrayadi, (2004), *Inflasi Dan Kaitannya Dengan Kinerja IHSK*, Jakarta Mei 2004, Kompas.
- Irawan, M. Suparmoko, (1995). *Ekonomika Pembangunan*, Edisi 5 Cetakan ke empat, Yogyakarta, Penerbit BPFE.
- Iskandar, Dedi. (2007). *Agglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi : Peran Karakteristik Regional di Indonesia*. Jakarta.

- Lincoln. Arsyad, (1999). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4 Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbit Bagian Penerbitan Sekiloh Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mankiw, N. Gregory (2003). *Teori Ekonomi Makro*. Edisi 5. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta
- Mangkusubroto, Guritno, (2001). *Ekonomi Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Michael P. Todaro, (2000). *Economic Development*, Seventh Edition, Ney York University, Addison Mesley.
- Mudrajad Kuncoro, (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Nopirin, (1992). *Ekonomi Moneter*, Buku 1, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Putong, Iskandar. (2002). *Ekonomi Mikro dan Makro*, Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sadono Sukirno, (1994). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadono Sukirno, (2001). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sadono Sukirno, (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Suparmoko, (1992) *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.
- Tukiran, (2012). *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta, LP3ES.
- Widarjono, Agus, (2007). “*Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*”. Yogyakarta : Ekonisia
- Yoeti, *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata (1997)* Jakarta. Pradnya Paramita.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Data Pendapatan Asli Daerah. <http://www.bps.go.id> . Diakses 17 Oktober 2016
- Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004
- Undang-Undang RI No.22 Tahun 1995
- Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999

